

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator penting keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah adalah laju pertumbuhan ekonominya. Ketika aktivitas ekonomi lebih besar dalam satu periode daripada yang terakhir, dapat dikatakan bahwa ekonomi sedang meningkat. Seberapa besar taraf hidup suatu negara dapat meningkat sebagai akibat dari kegiatan ekonomi disebut pertumbuhan ekonomi. Untuk memastikan bahwa semua segmen masyarakat dapat menikmati buah kemakmuran secara berkelanjutan, pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia memprioritaskan keadilan di samping laju pertumbuhan yang semakin cepat. Meskipun demikian, dalam kenyataannya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan manfaatnya sering kali tidak berjalan seimbang. Pada tahap awal pembangunan, kebijakan akan cenderung lebih fokus pada pencapaian tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan mengutamakan pengembangan sektor-sektor unggulan. Akibatnya, distribusi pembangunan menjadi tidak merata dan menimbulkan kesenjangan antarwilayah (Hasibuan, 1993). Ketimpangan pendapatan kemungkinan akan meningkat selama fase awal ekspansi ekonomi, menurut hipotesis U terbalik Simon Kuznets. Temuan ini sejalan dengan teori tersebut. Tetapi kesenjangan ini akan menyempit seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan ekonomi semakin matang.

Ketimpangan pendapatan antarwilayah menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini mencakup berbagai aspek, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan kerja (Agusta, 2014). Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin besar risiko munculnya masalah sosial-ekonomi, seperti meningkatnya kemiskinan, kriminalitas, urbanisasi yang tidak terkendali, serta ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan antarwilayah agar kebijakan pembangunan dapat dirumuskan secara lebih inklusif.

Menurut Arsyad (1999), ketimpangan pendapatan antar wilayah dapat disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan populasi ini berpotensi menurunkan pendapatan per kapita karena pertumbuhan penduduk tidak selalu diimbangi oleh

ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai. Namun, jika pertumbuhan populasi disertai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja, hal tersebut justru dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi Rosa dan Sovita (2016) menjelaskan, apabila laju pertumbuhan penduduk tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas, maka kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah seperti pengangguran dan kemiskinan.



Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat juga menjadi saksi atas kejadian tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1, Jawa Barat adalah provinsi terpadat di Indonesia, dengan populasi sekitar 49.000 pada tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2023 memiliki pola yang sangat tidak dapat diprediksi, dengan kecenderungan menurun terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan dampak dari perubahan demografi jangka pendek yang harus dimasukkan dalam rencana pembangunan daerah dan variabel eksogen jangka panjang (pandemi). Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya merupakan salah satu wilayah perkotaan utama yang populasinya tumbuh dengan pesat. Hal ini menimbulkan kepadatan penduduk jika dibandingkan dengan bagian selatan Jawa Barat yang penduduknya jauh lebih sedikit. Akibatnya, wilayah padat penduduk menghadapi tekanan besar pada ketersediaan lapangan kerja, perumahan, serta infrastruktur dasar. Jika tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penyebaran kesempatan ekonomi yang merata, pertumbuhan penduduk yang cepat justru memperbesar disparitas pendapatan antarwilayah di Jawa Barat.

Ada dua bentuk ketimpangan yang berbeda, seperti yang dikemukakan Kuncoro (2014). Ada disparitas pendapatan tingkat pertama seperti yang dinilai oleh indeks gini dan ketimpangan pendapatan tingkat kedua antara kelompok masyarakat. Seperti yang ditunjukkan oleh nilai rasio gini, ketidaksetaraan cenderung meningkat seiring dengan meluasnya kesenjangan pendapatan. Jika koefisien gini atau rasio gini mendekati nol, maka ketimpangan pendapatan dianggap hampir genap; jika mendekati satu, maka ketimpangan pendapatan dianggap sangat tidak merata. negara-negara dengan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata memiliki tingkat ketimpangan antara 0,50 dan 0,70 persen, sedangkan negara-negara dengan distribusi kekayaan yang lebih merata memiliki tingkat ketimpangan antara 0,20 dan 0,35 persen (Todaro, 2000). Rasio gini dapat ditentukan dengan membandingkan luas kurva Lorenz, yang mewakili kerataan sempurna, dengan seluruh luas setengah persegi.



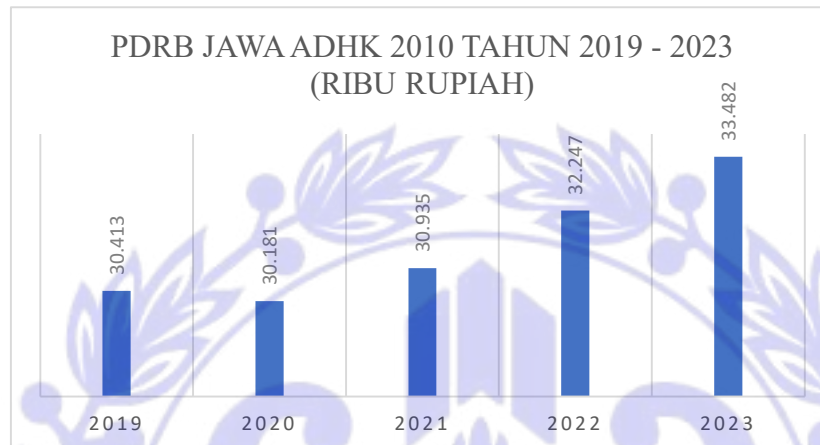
Gambar 1.2 Ratio Gini Jawa Barat Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Rasio gini, atau ketimpangan distribusi pendapatan, terus meningkat sejak tahun 2019 dan seterusnya di Jawa Barat, seperti terlihat pada gambar 1.2, karena tetap dalam kisaran nol banding satu. Jika nilainya mendekati satu, itu menunjukkan bahwa distribusi pendapatan akan lebih tidak merata. Hal ini akan menunjukkan bahwa distribusi pendapatan Jawa Barat masih cukup tinggi, sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kesenjangan pendapatan.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi tantangan yang cukup kompleks terkait dengan kesenjangan antarwilayah. Jawa Barat memiliki karakteristik wilayah yang beragam, terdiri dari 27 kabupaten/kota dengan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda. Wilayah perkotaan seperti

Bandung, Bekasi, Depok, dan Bogor memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sementara sejumlah kabupaten di wilayah selatan masih relatif tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi. Perbedaan tingkat pembangunan ini berimplikasi pada ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat antarwilayah di Jawa Barat.



Gambar 1.3 PDRB ADHK 2010 Jawa Barat Tahun 2019 - 2023

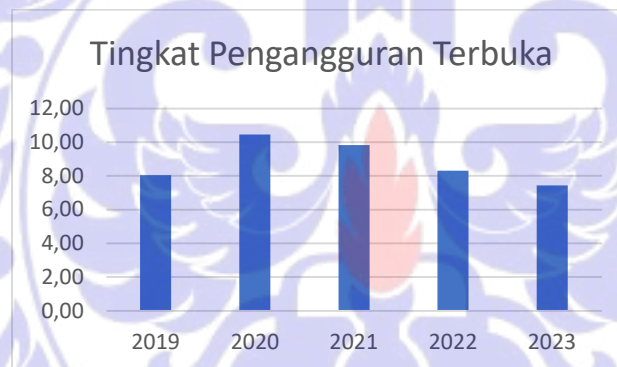
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Gambar 1.3 menampilkan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan PDRB Provinsi Jawa Barat meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2023. Hal ini disebabkan oleh dinamika ekonomi nasional dan global. Kesenjangan ini diperparah oleh wabah COVID-19 tahun 2020-2021, yang sangat melanda daerah pedesaan karena jatuhnya industri informal dan padat karya yang mempekerjakan banyak orang di sana. Perkembangan ekonomi Jawa Barat mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pasca wabah, namun selalu ada masalah ketidaksesuaian kekayaan daerah yang perlu direnungkan. Ukuran penting yang dapat digunakan untuk menganalisis derajat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, menurut Simanjuntak (2001). PDB per kapita yang lebih tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah lebih mampu menghasilkan nilai ekonomi, yang pada gilirannya menunjukkan bahwa penduduknya hidup pada tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Sederhananya, PDB per kapita yang tinggi melukiskan gambaran kesejahteraan yang relatif unggul bagi masyarakat setempat.

Sebaliknya, apabila PDRB per kapita suatu daerah berada pada tingkat yang rendah, hal tersebut mencerminkan keterbatasan dalam menciptakan output ekonomi sehingga daya beli, konsumsi, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar juga relatif

lebih terbatas. Kondisi ini pada gilirannya akan menghambat peningkatan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, PDRB per kapita sering dijadikan sebagai ukuran makroekonomi untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara agregat.

Salah satu komponen angkatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja. Orang-orang yang tinggal di daerah tersebut yang berusia minimal 15 tahun dan bekerja penuh waktu, paruh waktu, atau tidak bekerja membentuk apa yang dikenal sebagai angkatan kerja. Pertama, ada yang aktif mencari pekerjaan; kedua, mereka yang membuat rencana untuk memulai perusahaan baru atau mengambil pekerjaan baru; ketiga, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak yakin ada peluang; dan keempat, mereka yang memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.



Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data TPT Jawa Barat periode 2019–2023, terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi lonjakan cukup signifikan. Wabah COVID-19 telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, khususnya di Jawa Barat, dan situasi ini merupakan akibat langsung dari hal tersebut. data TPT Jawa Barat periode 2019–2023, terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi lonjakan cukup signifikan. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang memberi tekanan besar terhadap sektor perekonomian, khususnya di Jawa Barat.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis ketimpangan berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) per

kapita, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka antar wilayah di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019-2023

Dengan latar belakang diatas, peneliti akan mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **"ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS PENDAPATAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI JAWA BARAT PADA TAHUN 2019 – 2023"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan beberapa permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap tingkat disparitas pendapatan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat disparitas pendapatan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat disparitas pendapatan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan dengan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap tingkat disparitas pendapatan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat disparitas pendapatan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat disparitas pendapatan antar wilayah di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi terbaru terkait disparitas pendapatan yang terjadi di wilayah provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Manfaat Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya dalam disparitas pendapatan yang terjadi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi, maka peneliti membagi dalam beberapa bab. Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Masing- masing bab membahas tentang permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasannya, penulis merangkum dalam sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi alasan mengapa penelitian diperlukan. Untuk memperkuat alasan tersebut, maka data yang digunakan harus didukung dengan data yang memadai. Rumusan masalah merupakan inti dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Tujuan penelitian harus konsisten dengan latar belakang penelitian dan pertanyaan penelitian. Manfaat penelitian adalah suatu implikasi positif yang akan diperoleh jika tujuan tercapai. Sistematika penulisan adalah susunan bab-bab yang secara logis berhubungan dan menyatu serta mendukung dan mengarah pada pencapaian jawaban.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab landasan teori ini terdiri dari sub bab telaah pustaka, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Pada sub bab telaah pustaka ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu. Telaah pustaka ini memuat informasi-informasi dari penelitian-penelitian mengenai disparitas pendapatan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan seputar metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Metodologi terbagi menjadi beberapa bagian pokok yang akan dijelaskan. Pokok-pokok tersebut adalah: objek dan subjek penelitian, definisi operasional penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan terakhir teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan adalah suatu hal yang membahas tentang keterkaitan suatu faktor dari data yang diperoleh dari suatu masalah yang diajukan kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang telah diajukan dan menjelaskan dari data yang didapatkan dan hasil penyelesaian masalah.